



Strategi Penguatan Nasionalisme Perbatasan Indonesia

Mukhamad Murdiono ✉¹, Suyato ✉², Iqbal Arpanudin ✉³

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2020 Revisi Juni 2020 Dipublikasikan Juli 2020</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penguatan nasionalisme yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penguatan nilai nasionalisme generasi muda di daerah perbatasan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah para guru PPKn yang mengikuti program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis induktif. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan meliputi: reduksi data, kategorisasi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan nasionalisme yang dilakukan oleh guru PPKn yakni melalui pendekatan budaya dan psikologis dengan pembiasaan dan keteladanan dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mendukung antara lain kemauan peserta didik yang kuat, sinergi sekolah dan pemerintah, dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia. Sementara faktor penghambat antara lain: keterbatasan akses informasi sumber belajar mengenai nasionalisme, letak geografis, dan adat istiadat.</p>
<p>Keywords : Nationalism, Border area, SM3T area..</p>	<p>ABSTRACT <i>The strategy to Strengthen Indonesian Border Nationalism. This study aims to describe the strategy of strengthening nationalism carried out by Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers, supporting factors and inhibiting factors in strengthening the value of young generation's nationalism in Indonesia's border regions. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Research subjects were PPKn teachers who took part in educating undergraduate programs in the foremost, outermost, and disadvantaged regions in the Indonesian region. Data collection uses in-depth interview techniques and documentation. Data were analyzed by inductive analysis techniques. The steps of data analysis include: data reduction, categorization, data display, and drawing conclusions. The results showed that the strategy of strengthening nationalism carried out by PPKn teachers was through cultural and psychological approaches with habituation and exemplary learning. Supporting factors include a strong student will, school and government synergy, and the presence of the Indonesian National Army. While the inhibiting factors include: limited access to information about learning resources about nationalism, geographical location, and local wisdom.</i></p>
<p>How to Cite : Mukhamad Murdiono, Suyato, & Iqbal Arpanudin (2020). Strategi Penguatan Nasionalisme Perbatasan Indonesia. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 5(2), pp. 34-43. DOI: 10.24269/jpk.v5.n2.2020. pp34-43</p>	<p>ABSTRACT <i>The strategy to Strengthen Indonesian Border Nationalism. This study aims to describe the strategy of strengthening nationalism carried out by Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers, supporting factors and inhibiting factors in strengthening the value of young generation's nationalism in Indonesia's border regions. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Research subjects were PPKn teachers who took part in educating undergraduate programs in the foremost, outermost, and disadvantaged regions in the Indonesian region. Data collection uses in-depth interview techniques and documentation. Data were analyzed by inductive analysis techniques. The steps of data analysis include: data reduction, categorization, data display, and drawing conclusions. The results showed that the strategy of strengthening nationalism carried out by PPKn teachers was through cultural and psychological approaches with habituation and exemplary learning. Supporting factors include a strong student will, school and government synergy, and the presence of the Indonesian National Army. While the inhibiting factors include: limited access to information about learning resources about nationalism, geographical location, and local wisdom.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Negeri Yogyakarta ✉^{1, 2, 3}</p>	
<p>✉ E-mail: Mukhamad_murdiono@uny.ac.id ✉¹, suyato@uny.ac.id ✉², arpanudin@uny.ac.id ✉³</p>	

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Melalui pendidikan dapat disemaikan nilai-nilai yang mampu tumbuh dan berkembang sebagai pegangan untuk menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin kompleks. Gempuran teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, membuat dunia tanpa batas (*borderless*). Peristiwa yang terjadi di

belahan dunia lain dapat dengan mudah diketahui dalam waktu sekejap. Penggunaan teknologi internet sangat memudahkan orang di seluruh penjuru planet bumi untuk mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu dan wilayah. Internet dapat berperan dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara pemerintah dan warga negara (Kim, Kavanaugh, & Hult, 2011). Dunia yang tanpa batas di era global tidak hanya menyebabkan informasi yang

datang dari negara lain dapat dengan mudah masuk ke suatu negara, namun juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara.

Di era global abad 21, negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar akan muncul sebagai negara *super power* yang dapat “mengancam” eksistensi negara-negara pinggiran yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi lemah. Kecenderungan yang terjadi di negara *super power* akan diikuti oleh negara-negara berkembang di dunia. Pola hidup konsumerisme dan hedonistik yang berkembang subur di masyarakat barat dengan budaya individualisme, perlahan mencemari budaya luhur bangsa-bangsa timur yang terkenal santun dan memiliki semangat kolektivisme kuat. Telah terjadi globalisasi ekonomi yang merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Secara sederhana, beberapa dimensi globalisasi ekonomi yang saling berhubungan, seperti (a) globalisasi perdagangan barang dan jasa; (2) globalisasi pasar keuangan dan pasar modal; (3) globalisasi teknologi dan komunikasi; dan (4) globalisasi produksi (Benczes, 2014).

Globalisasi memengaruhi setiap aspek masyarakat, termasuk keyakinan, norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku, serta bisnis dan perdagangan (Banks, 2008, hal. 138). Terkait dengan globalisasi, apakah negara akan tetap kuat atau kehilangan pengaruhnya dalam konteks global akibat dari gempuran ekonomi global? Atau berubah dan beradaptasi dengan kondisi global tanpa kehilangan pengaruhnya. Sassen (Sassen, 2007) mengungkapkan mengenai berkurangnya pengaruh negara terhadap perekonomian. Negara tidak lagi menjadi operator sekaligus regulator terhadap sistem ekonomi negaranya. Negara hanya sebagai regulator, sementara posisi sebagai operator diserahkan pada sektor swasta. Negara membuka peluang investasi asing masuk sehingga arus ekonomi global masuk ke negara itu dan negara membuat regulasi terkait investasi tersebut.

Terdapat tiga posisi dasar mengenai hubungan antara negara dengan ekonomi dan teknologi global. *Pertama*, Sassen (Sassen, 2007) menyoroti kekalahan negara akibat globalisasi ekonomi. *Kedua*, menurutnya tidak

ada perubahan berarti terhadap posisi dan signifikansi negara akibat dari globalisasi ekonomi dan teknologi. *Ketiga*, terdapat akomodasi pengaruh ekonomi dan jaringan global tersebut di dalam negara, sehingga negara akan menyesuaikan dengan perubahan itu dan negara tetap pada jalur yang kuat dan berdaulat. Namun, Sassen (Sassen, 2007) memberikan posisi yang keempat di bahasan selanjutnya, yakni menurutnya negara dan efek dari globalisasi dalam bidang ekonomi dan teknologi ini saling mengadaptasi satu sama lain dan memberikan pengaruh positif

Globalisasi ekonomi kontemporer adalah hasil dari kemunculan tatanan ekonomi internasional secara bertahap yang dimulai dari konferensi ekonomi yang diadakan pada akhir Perang Dunia II di Inggris (Mir, Hassan, & Qadri, 2014). Amerika dan Inggris memainkan peran utama dalam keberhasilan konferensi yang mencapai konsensus tentang peningkatan perdagangan internasional serta menyepakati penetapan aturan mengikat dari kegiatan internasional. Konferensi Bretton Wood meletakkan dasar untuk pembentukan organisasi internasional penting lainnya seperti IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (Steger, 2013)

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Secara sederhana, beberapa dimensi globalisasi ekonomi yang saling berhubungan, seperti (a) globalisasi perdagangan barang dan jasa; (2) globalisasi pasar keuangan dan pasar modal; (3) globalisasi teknologi dan komunikasi; dan (4) globalisasi produksi (Benczes, 2014).

Semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa

yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir di seluruh dunia.

Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, Persoalan kecenderungan global yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa perlu untuk dihadapi dan diberikan jalan keluar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penguatan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Nussbaum (Banks, 2008) pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia kepada orang-orang di seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membangun generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan yang bermutu. Ketiga komponen itu meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson, 2001). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak-watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Memasuki paruh awal milenium ketiga setiap negara di dunia perlu memiliki strategi untuk menghadapi beragam permasalahan global. Cogan (1998) mengidentifikasi setidaknya ada tiga permasalahan global utama yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia.

Ketiga permasalahan itu meliputi: berkembangnya ekonomi global, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi, dan meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Meningkatnya populasi dunia sebagai salah satu permasalahan global, seperti telah dikemukakan Cogan, berdampak pada semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa berdasarkan ambang batas konsumsi minimal, 14 % rakyat Indonesia masih tergolong miskin (Lan & Manan, 2011). Kemiskinan dapat menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Kemiskinan menjadi permasalahan serius yang perlu segera diselesaikan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Bahkan, permasalahan kemiskinan merupakan tantangan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kadar nasionalisme Indonesia di kalangan rakyatnya.

Mengutip berita di Harian Kompas, tanggal 3 Juni 2010 Tirtosudarmo (2011: 17) menyatakan bahwa sekitar 2.000 warga di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) memilih berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Perpindahan kewarganegaraan ini dilakukan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Para warga di daerah itu, melihat bahwa sarana-sarana umum yang dimiliki negara jiran jauh lebih baik dibandingkan yang tersedia di negara sendiri. Perpindahan penduduk yang tidak hanya secara geografis tapi juga secara kewarganegaraan (*citizenship*) membuktikan bahwa kemiskinan dapat menjadi faktor yang sangat kuat melunturkan nasionalisme warga negara Indonesia. Penelitian lain menyatakan bahwa nasionalisme mejadi aspek penting dalam mempertahankan keberadaan negara-bangsa tetapi di sisi lain itu juga dapat menjadi penyebab disintegrasi jika pemerintah mengabaikan kepedulian pada area tertentu termasuk wilayah perbatasan (Setyanto, Satyawan, Wijaya, & Munestri, 2018).

Di sisi yang lain, arus globalisasi yang begitu cepat melintasi batas-batas negara dikhawatirkan dapat berdampak pada luntarnya nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu negara. Bagi Indonesia, proses globalisasi tidak dapat ditolak akan bersinggungan atau bahkan melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Disadari atau tidak nasionalisme Indonesia saat ini masih terus

berkembang dan belum sepenuhnya terbangun dengan kukuh. Proses globalisasi secara konseptual selama ini dianggap mendatangkan permasalahan bagi nasionalisme. Menurut Seda (2011) keresahan akan lunturnya nilai-nilai nasionalisme dalam konteks proses globalisasi dikarenakan konsep nasionalisme senantiasa dikaitkan dengan negara-bangsa, dimana peran negara masih sangat dominan. Nasionalisme tidak dikaitkan dengan konsep pasar dan komunitas.

Daerah perbatasan di wilayah negara Republik Indonesia merupakan daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Di daerah perbatasan wilayah negara Republik Indonesia perlu dilakukan penumbuhan dan penguatan jiwa nasionalisme. Di daerah perbatasan wilayah Republik Indonesia, nasionalisme warga negara rentan untuk tergadaikan jika melihat negara lain yang lebih menjanjikan kemakmuran. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan jiwa nasionalisme, terutama bagi para warga negara muda yang masih di bangku sekolah. Para generasi muda akan melanjutkan perjuangan para pendahulu atau pahlawan yang telah bersusah payah merebut dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme generasi muda melalui pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus yang dikembangkan oleh guru PPKn dalam menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme generasi muda di daerah perbatasan wilayah Republik Indonesia.

Penguatan nasionalisme generasi muda di daerah perbatasan wilayah Indonesia merupakan hal mendesak yang harus dilakukan dalam rangka penguatan integrasi nasional. Selama ini penelitian yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia masih jarang dilakukan. Hasil kajian melalui penelitian diharapkan akan memperkaya baik secara teoretis maupun praksis dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan nasionalisme warga negara muda.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Termasuk jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa, yaitu strategi

penguatan nilai nasionalisme di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Subjek penelitian ini yaitu para guru PPKn yang pernah mengajar di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali konsepsi, persepsi, gagasan, perasaan, motivasi, tuntutan, harapan, dan kepedulian para subjek penelitian tentang pentingnya penguatan nasionalisme melalui pembelajaran kewarganegaraan di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber berupa dokumen dan catatan untuk pengembangan analisis kajian. Untuk tujuan penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan catatan dan dokumen yang dipandang perlu untuk membantu analisis dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa buku teks, makalah, jurnal, dokumen kurikulum, hasil penelitian, dokumen negara. Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang ada keterkaitannya dengan penguatan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia.

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber, yaitu dengan cara mengecek ulang informasi dari sumber yang berbeda. Analisis data menggunakan analisis induktif, dengan langkah-langkah antara lain: menyusun data, memasukannya ke dalam unit-unit secara teratur, melakukan sintesis, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan harus dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikemukakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kondisi nasionalisme pada peserta didik di daerah perbatasan wilayah Indonesia digambarkan sangat beragam. Pendapat dari responden yang mengajar di Kabupaten Gayo Lues, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa pemahaman peserta didik tentang nasionalisme masih terbatas. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterbukaan pikiran peserta didik, sarana prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia (guru) yang kurang memiliki kompetensi mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) di sekolah. Bahkan, salah satu responden yang mengajar di Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan nasionalisme, arti penting nasionalisme bagi negara Indonesia, dan juga belum tahu mengenai perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme.

Namun demikian, di beberapa wilayah perbatasan Indonesia menunjukkan kondisi umum tentang pemahaman nasionalisme yang lebih baik. Penuturan salah seorang responden yang mengajar di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan bahwa secara umum kondisi nasionalisme peserta didik sudah baik. Mereka lebih menikmati hidup dan senang menjadi bagian dari Negara Indonesia dari pada hidup di negara tetangga (Timor Leste). Hal senada disampaikan oleh responden yang mengajar di Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat. Kondisi umum nasionalisme peserta didik cukup baik apabila dilihat dari beberapa indikator.

Indikator-indikator yang menunjukkan nasionalisme peserta didik cukup baik antara lain: (1) keikutsertaan dalam upacara bendera setiap hari Senin meskipun beberapa peserta didik harus dipaksa terlebih dahulu untuk mengikuti, (2) hafal sila-sila Pancasila meskipun tidak memahami maknanya, (3) familiar dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 meskipun tidak hafal dan tidak memahami, (4) mengetahui nama presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat, namun tidak hafal nama-nama mantan presiden dan wakil presiden, (5) bersungguh-sungguh dalam menyanyikan lagu kebangsaan meskipun beberapa peserta didik tidak hafal lirik, dan (6) khidmat ketika pengibaran bendera merah putih. Indikator-indikator tersebut menjadi bukti bahwa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan pemahaman dan sikapnya mengenai nasionalisme. Potensi ini menjadi penting untuk dikembangkan terutama melalui pembelajaran PPKn di sekolah.

Beragam cara dilakukan para guru PPKn di daerah perbatasan Indonesia untuk mengembangkan nasionalisme. Cara mengembangkan nasionalisme peserta didik yakni dari hal yang paling sederhana menurut penuturan NR di Aceh. Misalnya, mengajak guru dan kepala sekolah untuk mengadakan upacara bendera secara rutin, agar peserta didik paham pentingnya upacara bendera. Setiap pagi menyanyikan lagu nasional agar siswa terbiasa dan hafal lagu-lagu nasional. Memantau siswa agar tidak sering untuk membolos berangkat ke

sekolah. Menjelaskan kepada siswa tentang kebudayaan Gayo yakni *Krawang Gayo*, tari Saman Gayo, tari Bines itu sudah “*go international*” sudah terkenal dan mendunia sehingga dengan begitu siswa ikut bangga dan ikut melestarikan tarian tersebut.

Selain itu, penguatan nasionalisme dapat secara langsung dilakukan dalam pembelajaran PPKn di kelas. Guru PPKn berusaha untuk mengembangkan kompetensi dasar yang memuat penguatan nasionalisme. Menurut penuturan AL, pengembangan kompetensi dasar tentang penguatan nasionalisme peserta didik dilakukan dengan membuat indikator yang dapat memperdalam penguatan nasionalisme termasuk materi-materi serta kompetensi dasar keterampilan yang memuat nilai-nilai nasionalisme. Pengembangan kompetensi dasar terbatas, dilakukan oleh WP dengan mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator sesuai dengan buku pelajaran, karena terbatasnya sumber belajar, dan kekurangan fasilitas pendukung listrik.

Pilihan lain dilakukan ZKN dengan mengembangkan media pembelajaran yang berasal dari bahan alami yang benar-benar berasal dari alam sekitar yang dikaitkan dengan materi pembelajaran PPKn. Hal itu sebagai bentuk kreativitas karena keterbatasan fasilitas yang bertujuan agar peserta didik tetap mencintai NKRI dan tetap memiliki jiwa nasionalisme dengan mengajar PPKn dengan metode yang menarik dan menyenangkan.

Penuturan VA mengenai strategi penguatan nasionalisme dengan pengembangan kurikulum melalui pembelajaran di kelas dan juga pembiasaan dan keteladanan melalui kegiatan di luar kelas. Selanjutnya penuturan SY dengan pengembangan kurikulum melalui pembelajaran di kelas dan juga pembiasaan dan keteladanan melalui kegiatan di luar kelas. Namun demikian, beberapa responden menuturkan bahwa mereka tidak menyusun strategi khusus untuk penguatan nasionalisme dengan alasan ketiadaan akses dan sumber daya. Ada beberapa kendala yang dihadapi para guru dalam penguatan nasionalisme. Kendala-kendala tersebut diantaranya guru lain yang belum ikut serta dalam pengembangan nasionalisme. Selain itu, keterbatasan akses internet dan sumber daya listrik; keterbatasan buku-buku pelajaran sebagai sumber belajar mengenai nasionalisme; motivasi belajar peserta didik yang masih rendah; bahasa, letak geografis, dan adat istiadat.

Faktor-faktor pendukung pengembangan nasionalisme lahir dari kemauan/tekad peserta didik. Peserta didik sangat bersemangat untuk bersekolah dan sangat hormat pada para guru. Pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun guru mendukung pengembangan nasionalisme. Selain itu, juga kehadiran pasukan TNI di daerah perbatasan memberikan warna lain kepada para peserta didik. Mereka bisa belajar dari cerita pengalaman anggota TNI ketika bertugas. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, kaya akan sumber daya alam sehingga menjadi modal yang melimpah yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Selain itu, Indonesia terdiri dari beragam kearifan lokal yang berkembang jauh sebelum Indonesia berdiri menjadi dasar kesatuan bangsa. Aturan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah juga mendukung pengembangan nasionalisme peserta didik.

Indonesia sebagai negara bangsa tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan nasionalisme. Wilayah geografis Indonesia yang luas menjadi masalah dalam hal penguatan nasionalisme. Daerah Indonesia terdiri dari hampan yang luas dan memiliki ketidaksamaan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Terdepan, dan Terbelakang (SM3T) dengan tujuan pemerataan pendidikan. Salah satu misi yang dibawa oleh para guru di daerah sasaran SM3T adalah memberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme.

Nasionalisme pada saat ini menemukan konteks baru yang berbeda dari nasionalisme dahulu. Negara tidak pernah usang, tetapi sedang berubah menuju bentuknya yang baru. Negara-bangsa di dunia tetap akan bertahan dan masih kokoh berdiri jika para warga dan pemimpinnya responsif terhadap proses globalisasi (Latif, 2011). Seperti halnya udara, nasionalisme menyebar dan meresapi sistem global, negara, perilaku masyarakat dan dapat dilihat sebagai kekuatan konservatif dan revolusioner, dan juga meningkatkan status quo (Bieber, 2018).

Batas geografis cikal bakal nasionalisme nusantara tidak terikat hanya pada wilayah jajahan Belanda, namun jauh sebelum Belanda datang, wilayah nusantara terbentang sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, yakni (1) Tradisi kejayaan masa lalu itu, menjadi pendorong yang sangat penting dalam merintis

nasionalisme modern Indonesia. Selain itu, (2) berita kekalahan Kubail Khan oleh tentara Jawa. (3) Sriwijaya yang pernah menjadi pusat kajian internasional Budha, dan (4) kenangan keagungan Jawa pada masa lampau menjadi pendorong yang besar bagi terbangunnya kesadaran nasionalisme (Kahin, 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor (5) homogenitas keagamaan masyarakat, yakni Islam. Islam bukan hanya simbol pengikat rasa kebangsaan, namun sebagai simbol bagi perlawanan terhadap penyusup asing. Faktor integrasi lainnya adalah (6) adanya bahasa persatuan, yakni bahasa melayu pasar yang menjadi suatu bahasa nasional. (7) Integrasi nasional Indonesia dianggap sebagai akibat adanya *Voolksrad* (dewan rakyat). Dewan dibuat oleh Belanda, namun memberikan sumbangan luar biasa bagi kesadaran nasionalisme pribumi (Kahin, 2013).

Berdasar pada pandangan Kahin, awal mula nasionalisme tidak dapat diperkirakan secara pasti. Namun fase-fase ke arah kebangkitan nasionalisme mulai disuarakan dan diorganisasi pada dasawarsa kedua abad 20. Namun demikian, akar sejarahnya sudah terbentuk jauh sebelum itu sebagaimana yang penulis tulis di atas. Riak nasionalisme tumbuh pada masa-masa abad 20 ini, namun karena tidak ada unsur kepemimpinan yang menonjol, sehingga cenderung parsial. Namun demikian pergolakan di kalangan bawah (petani, buruh dan para kuli) yang menderita menyadarkan mereka untuk bergerak menentang imperialisme, tinggal menunggu munculnya elite yang memimpin revolusi (Kahin, 2013).

Negara-bangsa akan tetap berperan sebagai lokus utama bagi identitas warganya sejauh belum ada institusi lain yang secara memadai mampu menggantikannya sebagai unit kunci dalam mengubah perubahan global yang sedang terjadi (Latif, 2011). Negara-bangsa masih memiliki peran sentral dalam mengurus persoalan hak asasi manusia internasional. Nasionalisme yang hendak dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah nasionalisme dalam perspektif luas yang berdimensi *internationalism*.

Kondisi umum mengenai nasionalisme di daerah sasaran SM3T pada daerah-daerah perbatasan berada pada level menengah ke arah kurang. Beberapa wilayah sasaran SM3T dikategorikan pada level kurang baik dengan alasan utama adalah ketiadaan sumber daya manusia dan kesulitan akses. Wilayah

perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan negara lain dengan potensi wilayah perbatasan yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga selalu tergolong sebagai kawasan yang tertinggal, terisolir, terpencil, dan belum berkembang, termasuk pula di bidang pendidikan, bahwa wilayah perbatasan sebagaimana halnya di daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain (Poetranto, 2008).

Namun demikian di beberapa wilayah 3T tersebut kondisi umumnya baik jika dilihat dalam indikator dasar seperti: 1) keikutsertaan dalam upacara bendera hari senin meskipun beberapa peserta didik harus dipaksa terlebih dahulu untuk mengikuti; 2) hafal sila-sila Pancasila meskipun tidak memahami maknanya; 3) familiar dengan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 meskipun tidak hafal dan tidak memahami; 4) mengetahui nama presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat, namun tidak hafal nama-nama mantan presiden dan wakil presiden; 5) bersungguh-sungguh dalam menyanyikan lagu kebangsaan meskipun beberapa peserta didik tidak hafal lirik; 6) khidmat ketika pengibaran bendera merah putih.

Pemahaman tentang nasionalisme peserta didik di wilayah sasaran SM3T belum sepenuhnya baik. Secara umum belum memahami arti penting nasionalisme bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun peserta didik di beberapa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme. Padahal nasionalisme begitu penting bagi Indonesia karena semangat nasionalisme inilah yang akhirnya membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari era kolonialisme dan imperialisme yang telah lebih dari tiga abad menjajah Indonesia (Alfaqi, 2015).

Memahami nasionalisme dalam kerangka ideologi di dalamnya mengandung makna dari aspek *cognitive, goal/value orientation, dan strategic* (Apter, 1967). (1) *Cognitive*, terkait dengan pengetahuan akan kondisi sosial ekonomi politik dan hukum bangsanya. Oleh karena itu peran cendekiawan sangat penting untuk merumuskan formulasi yang tepat untuk memperkuat nasionalisme. Soedjatmoko (1991) menyebut nasionalisme tidak bisa tidak adalah nasionalisme yang cerdas karena nasionalisme itu harus disinari oleh kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan kesadaran sejarah. (2)

Goal/value orientation, yang menunjukkan adanya landasan nilai bersama/keinginan bersama yang mencakup berbagai aspek yang disepakati bersama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 adalah perjanjian bersama yang mengandung ide, gagasan penghormatan martabat manusia dan cita hidup bersama. (3) *Strategic*, yang merujuk pada usaha-usaha konkret menjadi Indonesia yang bertuhan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan berkeadilan sosial. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pendidikan di daerah perbatasan Indonesia.

Penguatan nasionalisme dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan pengembangan kompetensi dasar dalam pelajaran PPKn. Beragam cara dilakukan oleh para guru PPKn, namun mereka terkendala sarana, prasarana, dan akses terhadap sumber daya. Walaupun demikian tidak menyurutkan tekad mereka untuk mendidik generasi penerus bangsa di daerah perbatasan Indonesia. Sebagai seorang pendidik, guru-guru PPKn di daerah perbatasan Indonesia dalam setiap kegiatan pembelajarannya pendidik harus senantiasa menanamkan dan menumbuhkan sikap mencintai dan bangga terhadap tanah air. Pengembangan kompetensi dasar merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperkuat nasionalisme.

Kompetensi dasar tidak lain adalah kompetensi bermuatan substansi mata pelajaran/mata kuliah. Dalam pembelajaran PPKn, maka ruang lingkup di sekolah meliputi :

1. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (Winataputra, 2014).

Pengembangan kompetensi dasar yang dilakukan para guru tersebut dengan mengembangkan kompetensi dasar tentang

penguatan nasionalisme peserta didik yaitu dengan membuat indikator yang dapat memperdalam penguatan nasionalisme termasuk materi-materi serta kompetensi dasar keterampilan yang memuat nilai-nilai nasionalisme. Dalam konteks ini, Brooks dan Normore (2010) menyarankan agar para pendidik melek perspektif glocal (*Literacy for a Glocal Perspective*) yang meliputi sembilan domain pengetahuan khusus, yaitu (1) melek politik (*political literacy*), (2) melek ekonomi (*economic literacy*), (3) melek budaya (*cultural literacy*), (4) melek moral (*moral literacy*), (5) melek pedagogis (*pedagogical literacy*), (6) melek informasi (*information literacy*), (7) melek organisasi (*organizational literacy*), (8) melek spiritual dan religi (*spiritual literacy*) dan (9) melek temporal (*temporal literacy*) agar bisa membentengi penetrasi ideologi dan budaya global, bisa mengoyak nasionalisme kita sebagai bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia.

Beragam strategi penguatan nilai-nilai nasionalisme dilakukan oleh guru di daerah perbatasan Indonesia dengan pengembangan kurikulum melalui pembelajaran di kelas dan juga pembiasaan dan keteladanan melalui kegiatan di luar kelas. Terkait contoh keteladanan ini, pada setiap zaman, selalu memiliki tokohnya sendiri. Di antara mereka, ada yang menjadi serupa mutiara karena idealisme, integritas yang menawan, dan pengorbanan yang luar biasa dengan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka (Integrato, 2015). Keteladanan dalam pendidikan adalah cara mendidik dan memberi contoh dimana anak dapat menirunya baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun cara berfikir (Budiyono & Hermawati, 2017). Namun, seringkali Pilihan metode mengajar untuk membentuk warga negara yang baik pada daerah SM3T menggunakan metode ceramah sebagai metode mengajar mereka, meskipun ada beberapa yang menggunakan metode lain, seperti diskusi dan proyek (Suyato, Murdiono, Mulyono, & Arpanudin, 2016).

Ada beberapa kendala yang dihadapi guru PPKn dalam penguatan nasionalisme. Kendala-kendala tersebut diantaranya guru lain yang belum ikut serta dalam pengembangan nasionalisme. Kendala bahasa yang dialami para guru diatasi dengan belajar bahasa daerah setempat dan menyesuaikan bahasa mereka dengan belajar dan mencoba memahami adat yang ada di daerah sana. Dalam ilmu bahasa

dikenal istilah diglosia atau penggunaan dua bahasa, merupakan hal yang biasa dalam masyarakat yang multikultural. Demikian pula yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan bahasa daerah yang beragam pula memunculkan situasi berbahasa yang bersifat diglosia, yaitu penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam situasi kemasyarakatan yang berbeda-beda (Budhiono, 2009).

Meskipun ada berbagai kendala yang dihadapi, optimisme untuk penguatan nasionalisme generasi muda harus tetap dikembangkan. Ada juga faktor pendukung dalam penguatan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia. Faktor-faktor pendukung pengembangan nasionalisme lahir dari tekad para peserta didik. Peserta didik sangat bersemangat untuk bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kemauan keras untuk belajar. Kepala sekolah, guru, dan karyawan di sekolah juga mendukung pengembangan nasionalisme. Selain itu, juga kehadiran pasukan TNI di daerah perbatasan memberikan warna lain kepada para peserta didik. Para anggota TNI dapat berbagi cerita pengalaman ketika bertugas di daerah perbatasan. Indonesia juga sebagai negara yang kaya sumber daya alam sehingga menjadi modal yang melimpah yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan bangsa. Selain itu, Indonesia terdiri dari beragam kearifan lokal yang berkembang jauh sebelum Indonesia berdiri menjadi landasan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional di sekolah juga mendukung pengembangan nasionalisme peserta didik.

SIMPULAN

Strategi penguatan nasionalisme yang dilakukan oleh guru PPKn di daerah perbatasan Indonesia dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan pembiasaan serta keteladanan di luar kelas. Dalam pembelajaran PPKn penguatan nasionalisme dilakukan dengan pengembangan kompetensi dasar yang menyisipkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam indikator pencapaian kompetensi, inovasi media pembelajaran di tengah keterbatasan akses, dan evaluasi dengan penilaian non tes. Faktor-faktor pendukung pengembangan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia lahir dari kemauan/tekad peserta didik yang memiliki semangat, sinergi sekolah dan pemerintah, dan

kehadiran TNI di daerah sasaran SM3T. Faktor penghambat penguatan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia antara lain: keterbatasan akses internet dan sumber daya listrik; keterbatasan buku-buku pelajaran sebagai sumber belajar mengenai nasionalisme; bahasa, letak geografis, dan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia melalui perspektif nasionalisme, politik identitas, serta solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 111–116.
- Apter, D. E. (1967). *The politics of modernization*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Research*, 37(3), 129–139.
- Benczes, I. (2014). The Globalization of economic relations. In *The SAGE handbook of globalization* (hal. 133–150). <https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9>
- Bieber, F. (2018). Is nationalism on the rise? Assessing global trends. *Ethnopolitics*, 17(5), 519–540. <https://doi.org/10.1080/17449057.2018.1532633>
- Branson, M. stimman. (2001). *Principles and practices of democracy in the education of social studies teachers. Civic learning in teacher education* (J. J. Patrick & R. S. Leming, Ed.). Bloomington IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education.
- Brooks, J. S., & Normore, A. H. (2010). Educational leadership and globalization: Literacy for a glocal perspective. *Educational Policy*, 24(1), 52–82.
- Budhiono, R. H. (2009). Bahasa ibu (bahasa daerah) di Palangkaraya: pergeseran dan pemertahanannya. *Adabiyat*, Vol 8(1), 196–210.
- Budiyono, & Hermawati, Y. (2017). Penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai keteladanan gurud an orang tua siswa sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional PPKn III*.
- Cogan, J. J. (1998). Citizenship Education for the 21st Century: setting the context. In J. J. Cogan & R. Derricott (Ed.), *Citizenship for the 21 st Century: An Introduction Perspectives on Education* (hal. 1–20).
- Integrito. (2015). Menghidupkan kembali keteladanan pendiri bangsa. *Integrito*, vol 44.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). Civic engagement and internet use in local governance: hierarchial linear models for understanding the role of local community groups. *Administration & Society*, 43(7), 807–835. <https://doi.org/10.1177/0095399711413873>
- Lan, T. J., & Manan, M. (2011). Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: sebuah pengantar. In *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mir, U. R., Hassan, S. M., & Qadri, M. M. (2014). Understanding globalization and its future: An analysis. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 34(2), 607–624.
- Poetranto, T. (2008). Bagaimana mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. *Buletin Puslitbang Strahan Balitbang Dephan*.
- Sassen, S. (2007). *A sociology of globalization*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Seda, F. S. (2011). Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia, dan “Ketahanan Budaya” di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi: Suatu Kajian Sosiologis. In *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setyanto, A., Satyawan, I., Wijaya, S., & Munestri, S. (2018). Nationalism in the border area: A portrait of Sebatik Island. *5th International Conference on Social and Political Sciences*, 241(IcoSaPS), 123–126. <https://doi.org/10.2991/icosaps-18.2018.29>
- Steger, M. B. (2013). *Globalization: Avery short introduction* (3 ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Sudjatmoko. (1991). Nasionalisme sebagai prospek belajar. *Prisma*.
- Suyato, S., Murdiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. (2016). Upaya pembentukan warga negara yang baik dan tantangan yang dihadapi oleh para guru

PKn peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 137–150.
<https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737>

Winataputra, U. S. (2014). Diskursus aktual tentang paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks kurikulum 2013. *Seminar Nasional AP3KNI*, 1–12. Surakarta: AP3KNI dan Universitas Negeri Sebelas Maret.